



PERNYATAAN BERSAMA
Dukungan Penguatan Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan
Demi Perlindungan Masyarakat dan Lahirnya Generasi Emas Indonesia

KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kami, yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian mendalam terhadap dampak negatif konsumsi zat adiktif tembakau dan turunannya di Indonesia, dengan tegas dan lugas menyuarakan pernyataan bersama ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap penguatan Pengamanan Zat Adiktif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang saat ini sedang dalam proses perumusan.

Dalam upaya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menciptakan Generasi Emas Indonesia, kami menyerukan komitmen yang lebih kuat dalam mengejar target penurunan prevalensi perokok anak. Prevalensi yang masih tinggi adalah cerminan kegagalan pemerintah dalam menanggapi masalah yang telah mendera bangsa ini selama puluhan tahun.

Kami menyoroti beberapa poin krusial yang harus diimplementasikan dalam RPP Kesehatan untuk memastikan keberhasilan pengamanan zat adiktif:

Perluasan Peringatan Kesehatan Bergambar

Mengajukan tuntutan agar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan produk tembakau diperluas semaksimal mungkin hingga 90% untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi tersebut.

Pembatasan Akses Produk Tembakau dan Rokok Elektronik

Mendesak agar pemerintah melarang penjualan produk tembakau secara ketengan, melalui mesin mandiri, dan melalui *e-commerce*. Pembatasan di sekitar sekolah harus diperketat untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif rokok.

Pengetatan Iklan, Promosi, dan Sponsor

Menuntut pengetatan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media penyiaran dan media pers. Larangan iklan di internet dan di luar ruang termasuk pemajangan (*display*) produk harus diterapkan sesuai praktik baik yang telah dilakukan di berbagai daerah untuk mencegah dan melindungi anak-anak

100% Kawasan Tanpa Rokok

Mendorong penerapan 100% Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 tanpa terkecuali, sebagai langkah konkret dalam melindungi masyarakat.

Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Memberikan dukungan penuh kepada upaya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan aturan secara efektif dan menyeluruh.

Soliditas Pemerintah

Menyerukan agar pemerintah bersikap kompak dan solid dalam upaya penguatan Pengamanan Zat Adiktif, sesuai dengan amanat negara untuk melindungi rakyat.

Tidak Terpengaruh oleh Industri Rokok

Mendukung pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh upaya intervensi dari industri rokok yang hanya bertujuan melanggengkan bisnisnya di atas penderitaan rakyat.

Pertahankan Aturan Pengamanan Zat Adiktif

Mendukung pemerintah agar tetap teguh mempertahankan aturan Pengamanan Zat Adiktif di dalam RPP Kesehatan sebagai langkah urgensi perlindungan masyarakat dari bahaya rokok.

Rokok Legal, tetapi Tidak Normal

Maka produk zat adiktif tembakau, rokok konvensional dan rokok elektronik harus diatur dan dibatasi konsumsinya demi menekan dampak buruk yang diakibatkannya.

Maka dengan ini kami menekankan bahwa kegagalan mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam menurunkan prevalensi perokok anak adalah bukti ketidakseriusan pemerintah. Bahwa aturan yang ada, yaitu PP No. 109 tahun 2012 terbukti lemah karena tidak dapat membendung kenaikan prevalensi perokok, terutama di kalangan rentan; anak dan masyarakat pra sejahtera.

Kami mengajak pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, melindungi generasi masa depan, dan melaksanakan langkah-langkah konkret demi mencapai Indonesia yang sehat dan berdaya saing, berdaulat dan setara dengan negara-negara besar lainnya.

Jakarta, 22 November 2023

Hormat kami,

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI)
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
Indonesia Institute for Social Development (IISD)
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)
Komnas Pengendalian Tembakau
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)
Rumah Mediasi Indonesia
Raya Indonesia
Tobacco Control Support Center (TCSC)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Yayasan Lentera Anak
Udayana Central
Yayasan Kepedulian Untuk Anak (KAKAK)
No Tobacco Community